



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA
KOMODITI**

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
BIRO PENGAWASAN PASAR
BERJANGKA DAN FISIK
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti sebagai salah satu unit Eselon II Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi – Kementerian Perdagangan RI, telah dapat menyelesaikan kegiatan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) tahun 2021 yang merupakan **bentuk pertanggungjawaban serta dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik pada tahun 2021** dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik ini telah disesuaikan dengan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 794/M-DAG/KEP/08/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1011/M-DAG/KEP/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Akhir kata diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti ini dapat memberikan manfaat dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Bappebti dimana perdagangan sebagai sektor penggerak pertumbuhan dan daya saing ekonomi, serta penciptaan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini.

Jakarta, Februari 2022
Kepala Biro Pengawasan
Pasar Berjangka dan Fisik,



Mardiana Listyowati

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam pelaksanaan program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi pada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Tahun 2021, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik bertanggungjawab mendukung kegiatan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi dengan sasaran strategis yaitu **meningkatkan hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK)** agar industri PBK dapat berjalan secara tertib, wajar, efektif, efisien, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat.

Penilaian capaian kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti tahun 2021 dapat dilihat dari *Output* yang diharapkan dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan di awal tahun 2021 melalui Perjanjian Kinerja Bappebti. Berikut Indikator Kinerja beserta target dan realisasi Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik:

No	Indikator Kinerja	Kinerja Fisik			Kinerja Keuangan		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
1	Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi	47	47	100	369.931.000	368.576.793	99,63
2	Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT	57	81	142,11	805.277.000	805.051.700	99,97
3	Persentase pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	73%	100%	136,99	187.760.000	187.004.400	96,59

Dari pencapaian kinerja 3 (tiga) Indikator Kinerja yang telah disebutkan diatas, dapat diakumulasikan bahwa rata-rata nilai capaian Indikator Kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik tahun 2021 sebesar **126,37%**. Jumlah Anggaran Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik yang digunakan untuk pencapaian indikator kinerja kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp1.362.968.000,-. Pada tahun 2021 telah direalisasikan sebesar Rp1.360.632.893,- yaitu sebesar 99,82% dari pagu anggaran.

Meskipun setiap kegiatan telah memenuhi target capaian, namun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik dalam memenuhi target kinerja pada Tahun 2021 antara lain:

- Terdapat kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana karena adanya pandemi COVID-19 yang memaksa kegiatan perkantoran dilakukan secara terbatas atau dilakukan dari rumah (*work from home*);
- Terdapat optimalisasi anggaran terkait perubahan fokus anggaran (*refocusing*) untuk tahun 2021 yang lebih ditekankan pada penanganan virus covid-19 di Indonesia sehingga anggaran yang sedianya akan digunakan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target indikator menjadi terdampak.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel dan Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Isu Strategis Organisasi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	6
A. Perencanaan Strategis	6
B. Rencana Kinerja Tahunan.....	7
C. Perjanjian Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	10
A. Capaian Kinerja Organisasi	10
B. Capaian Kinerja Anggaran	33
BAB IV PENUTUP.....	35
LAMPIRAN	
1. Bagan Struktur Organisasi	36
2. Dokumen Perjanjian Kinerja	37
3. Formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).....	39
4. Lembar Indikator Kinerja Utama (IKU).....	41

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1	Jumlah Sumber Daya Manusia Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik.....	4
Tabel 2	Capaian Indikator Kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Tahun 2021	10
Tabel 3	Capaian Indikator Kinerja 1. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik ..	12
Tabel 4	Rekapitulasi Pialang Berjangka Peserta SPA yang Dikenakan aturan Kewajiban Bertransaksi di Bursa Berjangka.....	14
Tabel 5	Rekapitulasi Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang Dikenakan aturan Kewajiban Bertransaksi di Bursa Berjangka.....	14
Tabel 6	Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi	16
Tabel 7	Share Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi.....	17
Tabel 8	Aspek Penilaian Kepatuhan Pialang Berjangka.....	19
Tabel 9	Aspek Penilaian Kepatuhan Pedagang Penyelenggara SPA	20
Tabel 10	Nilai Capaian Jumlah Pelaku Usaha Yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT selama Tahun 2021.....	21
Tabel 11	Capaian Indikator Kinerja 2. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik...	23
Tabel 12	Capaian Indikator Kinerja 3. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik	29
Tabel 13	Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit Tahun 2021.....	32
Tabel 14	Anggaran Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Tahun 2016 – 2021.....	34
Tabel 15	Realisasi Anggaran Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Tahun 2021.....	34
Gambar 1	Perjanjian Kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik.....	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Peran Strategis Organisasi

1. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Kewajiban ini meliputi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) tingkat kementerian, Unit Kerja Eselon I dan Eselon II, serta unit kerja mandiri di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik yang merupakan salah satu unit Eselon II di lingkungan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Tahun Anggaran 2021. Dalam Pelaporan kinerja ini, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan maupun kegagalan sesuai tingkat kinerja yang dicapai.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) ini mengacu pada Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 794/M-DAG/KEP/08/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan yang merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1011/M-DAG/KEP/12/2012.

2. Peran Strategis

Dengan semakin berkembangnya industri Perdagangan Berjangka Komoditi, maka Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik sebagai Unit Eselon II di Bappebti mempunyai peran yang strategis dalam mendukung kebijakan Bappebti untuk melakukan pengawasan Pasar Berjangka di Indonesia serta pengawasan pasar fisik yang diselenggarakan di Bursa Berjangka.

Peran strategis itu dilakukan dengan melakukan pengawasan secara optimal atas industri perdagangan berjangka di Indonesia melalui:

- a. Pengamatan dan pengawasan secara cermat terhadap setiap kegiatan transaksi yang dilakukan oleh Pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi;
- b. Pengawasan secara berkala terhadap kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya kepatuhan terkait pelaporan keuangan dan integritas keuangan pelaku usaha serta kegiatan pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi;
- c. Pengawasan secara berkala melalui pelaksanaan Audit dengan berbasis resiko kepada pelaku usaha Perdagangan Berjangka.

B. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan, disebutkan bahwa Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan transaksi, pengawasan kepatuhan dan audit Perdagangan Berjangka Komoditi;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan transaksi, pengawasan kepatuhan dan audit Perdagangan Berjangka Komoditi;
3. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan transaksi, pengawasan kepatuhan dan audit Perdagangan Berjangka Komoditi;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik memiliki struktur organisasi sebagai berikut: 1 (satu) orang Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik yang dibantu oleh 4 (empat) Pemeriksa PBK Ahli Madya, 5 (lima) Pemeriksa PBK Ahli Muda, 1 (satu) Analis Kebijakan Ahli Muda, dan ditunjang oleh 1 (satu) Kepala Sub.Bagian Tata Usaha, 8 (delapan) Pengawas PBK, 1 (satu) Analis Data Dan Informasi, 1 (satu) Verifikator Keuangan, dan 6 (enam) orang pegawai honorer sehingga SDM pada Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik berjumlah 29 orang .

Adapun tugas dan fungsi pegawai pada Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik adalah sebagai berikut:

Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik: melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi. Dibantu oleh:

1. **Koordinator Bidang Pengawasan Transaksi** (Pemeriksa PBK Ahli Madya) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi. Membawahi:
 - a. **Kepala Sub Koordinator Bidang Pengawasan Transaksi Multilateral (Pemeriksa PBK Ahli Muda)** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan pasar fisik yang diselenggarakan di Bursa Berjangka.
 - b. **Kepala Sub Koordinator Bidang Pengawasan Transaksi Bilateral (Pemeriksa PBK Ahli Muda)** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan transaksi kontrak derivatif lainnya yang dilaporkan ke Bursa Berjangka dan didaftarkan ke Lembaga Kliring Berjangka.
2. **Koordinator Bidang Pengawasan Kepatuhan** (Pemeriksa PBK Ahli Madya) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kepatuhan pelaporan keuangan dan kegiatan pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi serta urusan tata usaha dan rumah tangga Biro. Membawahi:
 - a. **Kepala Sub Koordinator Bidang Pengawasan Kepatuhan Pelaporan Keuangan (Analisis Kebijakan Ahli Muda)** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kepatuhan pelaporan keuangan pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi.
 - b. **Kepala Sub Koordinator Bidang Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha (Pemeriksa PBK Ahli Muda)** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan kepatuhan kegiatan pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi.

3. **Koordinator Bidang Audit (Pemeriksa PBK Ahli Madya)** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit Perdagangan Berjangka Komoditi. Membawahi:
 - a. **Kepala Sub Koordinator Bidang Audit I (Pemeriksa PBK Ahli Muda)** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi untuk wilayah DKI Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
 - b. **Kepala Sub Koordinator Bidang Audit II (Pemeriksa PBK Ahli Muda)** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi untuk wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera dan Bali.
4. **Kepala Sub Koordinator Bidang Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Fungsional dan Staf Tata Usaha mempunyai tugas untuk membantu Kepala Sub Koordinator di masing-masing bidang di lingkungan Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik.

Honorar mempunyai tugas untuk membantu dan menunjang pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik.

Tabel 1.

Jumlah Sumber Daya Manusia Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

Kelompok Jabatan	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
Struktural	Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik	S2	1 orang
	Kepala Sub Bagian	S1	1 orang
Staf Tata Usaha	Analisis Data dan Informasi	S1	1 orang
	Verifikator Keuangan	D3	1 orang
Fungsional	Pemeriksa PBK Ahli Madya	S2	4 orang
	Pemeriksa PBK Ahli Muda	S2	4 orang
		S1	1 orang
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	S2	1 orang
	Pengawas PBK	S2	1 orang
S1		8 orang	
Honorar	PPNPN	S2	2 orang

		S1	2 orang
		SLTA	2 orang
JUMLAH PEGAWAI			29 orang

Sumber: Sistem Informasi Kepegawaian Kemendag

C. Isu Strategis Organisasi

Hal yang menjadi isu strategis Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik adalah pengawasan terhadap Calon Pedagang Aset Kripto. Sampai saat ini telah tercatat sebanyak 13 (tiga belas) Calon Pedagang Aset Kripto yang telah terdaftar di Bappebti. Dengan berlakunya Perba 5 Tahun 2019 yang telah mengalami 3 kali perubahan, yaitu menjadi Perba 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, Perba 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, dan Perba 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka, serta Surat Edaran Kepala Bappebti No. 758/BAPPEBTI/SE/12/2019 tentang Penyampaian Laporan Berkala dan Sewaktu-waktu atas Pelaksanaan Perdagangan Aset Kripto, maka Bappebti mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha aset kripto yang telah terdaftar tersebut, baik terkait integritas keuangan, transaksi, maupun kegiatan pelaku usaha.

Hal yang menjadi isu adalah masih belum seluruh calon pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti menyampaikan laporan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga diperlukan adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan terhadap calon pedagang aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti.

Selain terkait pengawasan aset kripto, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik juga dihadapkan untuk segera menyiapkan konsep pengawasan terkait Perdagangan Fisik Emas Digital, meskipun sampai dengan akhir tahun 2021, kegiatan Perdagangan Fisik Emas Digital masih belum aktif transaksinya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Perencanaan Strategis (Renstra) Bappebti yang telah disusun dengan mengacu pada Visi Pemerintah yaitu **”Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**.

Untuk dapat mewujudkan visi di atas, maka Kementerian Perdagangan memiliki 3 (tiga) misi, dimana salah satu misinya terkait dengan tugas dan fungsi Bappebti yaitu **”Meningkatkan perdagangan dalam negeri yang bertumbuh dan berkualitas”**.

2. Tujuan dan Sasaran

Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan fisik yang mempunyai tujuan **”Meningkatkan pengawasan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaku usaha PBK”**.

Dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan fisik memiliki sasaran **”Meningkatkan hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi”**

3. Kebijakan dan Strategi

Dalam mencapai Sasaran Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, maka Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengawasan Transaksi Pelaku Usaha PBK;
- b. Meningkatkan pengawasan kepatuhan pelaporan keuangan dan kegiatan pelaku usaha PBK;
- c. Meningkatkan pelaksanaan Audit pelaku usaha PBK.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik menetapkan beberapa langkah strategis, yaitu:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan pengawasan transaksi pasar berjangka dan pasar fisik yang diselenggarakan di Bursa Berjangka
- b. Mengoptimalkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan serta pelaporan keuangan Pelaku Usaha PBK;

- c. Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan Audit Pelaku Usaha Perdagangan Berjangka Komoditi;

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi Bappebti tahun 2020–2024 maka Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik melaksanakan 1 (satu) program yang didukung oleh 14 (empat belas) sub kegiatan.

B. Rencana Kinerja Tahunan

1. Program

Dalam pelaksanaan program kerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik T.A. 2021 telah disusun beberapa kegiatan operasional Perdagangan Berjangka. Kegiatan-Kegiatan tersebut telah tercantumkan dalam Pagu Indikatif Bappebti T.A. 2021 dalam program “Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi”.

2. Kegiatan

Dalam rangka mendukung program Bappebti pada T.A. 2021, sesuai Rencana Kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Tahun 2021 telah menyusun kegiatan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, yang terbagi menjadi sub-sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengawasan Transaksi PBK;
- b. Monitoring Lokasi Serah Terima Fisik Komoditi;
- c. Pengelolaan Data Pengawasan Transaksi PBK;
- d. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA
- e. Monitoring Perkembangan Harga Komoditi Pasar Berjangka;
- f. Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK;
- g. Pengawasan Kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK;
- h. Pertemuan Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK;
- i. Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK;
- j. Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK
- k. Audit Pelaku Usaha PBK;
- l. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit;
- m. Sertifikasi Auditor Bappebti
- n. Pengembangan Sistem Manajemen Audit.

3. Indikator Kegiatan

Untuk penilaian pencapaian kegiatan Biro telah ditetapkan indikator kegiatan Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Tahun 2021 sesuai Perjanjian Kinerja, sebagai berikut :

- a. Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi dengan target sebanyak 47 perusahaan;
- b. Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT dengan target sebanyak 57 perusahaan;
- c. Persentase Pelaku Usaha PBK yang telah menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit dengan target sebesar 73%

C. Perjanjian Kinerja


Dalam rangka meningkatkan kinerja di lingkungan Kementerian Perdagangan khususnya unit kerja BAPPEBTI. Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik menetapkan sasaran kegiatan yaitu “Meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaku usaha dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi.” Untuk mencapai sasaran ini telah ditetapkan Perjanjian Kinerja dengan 3 (tiga) indikator yaitu:

- a. Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi
 Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, maka perlu dilakukan pengawasan transaksi terhadap pelaku usaha guna memastikan transaksi yang dilakukan sudah memenuhi ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 2021 Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik menargetkan 47 (empat puluh tujuh) perusahaan yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi .
- b. Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT

Dalam rangka evaluasi terhadap pelaku usaha PBK, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik melakukan evaluasi terhadap Kegiatan Operasional, Keuangan, dan program APU PPT untuk menghimpun berbagai informasi tentang kegiatan para pelaku usaha PBK sehingga didapatkan gambaran mengenai perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode tertentu serta melakukan analisis dan penilaian terhadap Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK untuk mengetahui posisi dana nasabah yang dikelola oleh Pialang Berjangka. Untuk Tahun 2021 telah ditetapkan target atas indikator ini adalah sebanyak 57 perusahaan.

c. Persentase Pelaku Usaha PBK yang telah menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit

Pengawasan melalui pelaksanaan Audit terhadap pelaku usaha PBK juga perlu dilakukan guna memastikan terjaganya integritas pelaku usaha serta terciptanya perlindungan terhadap nasabah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pada tahun 2021 Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik menargetkan Persentase Pelaku Usaha PBK yang telah menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit sebanyak 73%.



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
Gedung Bappebti Lantai 3 - 5
Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
Telephone : (021) 31924744 Facsimile : (021) 31923204
Website : http://www.bappebti.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
NOMOR *CU* /BAPPEBTI.3/PK/01/2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardiyana Listyowati
Jabatan : Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Sidharta Utama
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi


Selaku atasannya langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Kedua: 
Sidharta Utama


Pihak Pertama: 
Mardiyana Listyowati


LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO PENGAWASAN PASAR BERJANGKA DAN FISIK
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

PROGRAM:
Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PREDIKSI CAPAIAN (%)				Penanggung Jawab
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Meningkatnya hasil pengawasan terhadap Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam pelaksanaan transaksi Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan dan APU PPT Persentase pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	47 Perusahaan	85	91	95	100	Bidang Pengawasan Transaksi
			57 Perusahaan	85	90	95	100	Bidang Pengawasan Kepatuhan
			73%	85	90	95	100	Bidang Audit

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PREDIKSI CAPAIAN (%)				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	Pelaku Usaha yang patuh dalam pelaksanaan Transaksi	711.930.000	10	30	65	100	Bidang Pengawasan Transaksi
2	Pelaku Usaha yang patuh dalam kegiatan operasional, Keuangan dan APU PPT	1.163.277.000	15	50	75	100	Bidang Pengawasan Kepatuhan
3	Pelaku Usaha PBK yang diaudit	581.951.000	10	35	65	100	Bidang Audit
JUMLAH		2.457.158.000	12	38	68	100	

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi: 
Sidharta Utama

Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik: 
Mardiyana Listyowati

Gambar 1 . Perjanjian Kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 794/M-DAG/KEP/08/2015 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Perdagangan, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik telah menetapkan Indikator Kinerja (IK) tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategis Bappebti tahun 2020-2024.

Capaian Kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti pada tahun 2021 menunjukkan hasil pengukuran yang baik karena telah berhasil melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hasil pengukuran hasil rata-rata capaian indikator kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik pada tahun 2021 mencapai angka sebesar 126,37 %.

Tabel 2
Capaian Indikator Kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
Tahun 2021

No	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2021	Capaian Tahun 2021	Prosentase Capaian (%)
1	Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi	47	47	100%
2	Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT	57	81	142,11%
3	Persentase pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	73%	100%	136,99%
Rata-rata capaian				126,37%

Berdasarkan tabel di atas dapat diakumulasikan bahwa rata-rata nilai capaian Indikator Kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik tahun 2021

sebesar **126,37%**. Berdasarkan capaian indikator kinerja utama tersebut dalam tabel, terlihat bahwa 3 (tiga) indikator kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti yaitu **IK-1 “Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi”**, **IK-2 “Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT”** dan **IK-3 “Persentase pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit”** berhasil memenuhi target yang ditetapkan.

Berikut akan dijelaskan pencapaian kinerja secara rinci dari setiap indikator kinerja, dimana rumus yang digunakan untuk mengukur ketiga Indikator Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik adalah :

$$\text{Prosentase Pencapaian Target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Adapun evaluasi dan analisis secara rinci dari masing-masing Indikator Kinerja Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik adalah sebagai berikut:

a. IK - 1, Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi

Adapun Pencapaian Indikator Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh dalam Pelaksanaan Transaksi berdasarkan pada capaian

1. Kepatuhan Pialang Berjangka dalam Pelaksanaan Transaksi, terdiri dari kepatuhan dalam penyampaian laporan dan integritas dalam bertransaksi
2. Kepatuhan Pedagang Penyelenggara SPA dalam Pelaksanaan Transaksi, terdiri dari kepatuhan dalam penyampaian laporan dan integritas dalam bertransaksi

Dengan formula perhitungan menggunakan rata-rata tertimbang/bobot dimana untuk kepatuhan penyampaian laporan pialang dan penyelenggara SPA bobotnya 75% dan kepatuhan integritas 50% sebagai berikut:

=	Rata-rata Kepatuhan Penyampaian Laporan Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara SPA + Rata-rata Kepatuhan Pemenuhan Integritas Transaksi Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara SPA
	2

Sehingga besarnya capaiannya adalah:

=	75%*84	+	50%*59
		2	

= 47perusahaan

Jadi capaian Indikator Kinerja "Jumlah Pelaku Usaha PBK yang Patuh dalam Pelaksanaan Transaksi" pada tahun 2021 adalah sebanyak **47 (empat puluh tujuh) perusahaan.**

Tabel. 3
Capaian IKK-1 Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi	47	47	100%

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Jumlah Pelaku Usaha PBK yang patuh dalam pelaksanaan transaksi tercapai sebesar 47 perusahaan, Tercapainya target jumlah pelaku usaha yang patuh dalam pelaksanaan transaksi karena koordinasi yang baik antar unit eselon II Bappebti dalam melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaku usaha PBK sehingga pelaku usaha memahami aturan mekanisme transaksi PBK.

Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020, jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam pelaksanaan transaksi mengalami penurunan sebesar 16 pelaku usaha dimana capaian pada tahun 2020 tercapai 63 pelaku usaha. Apabila capaian Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebesar 54 perusahaan maka Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi tahun 2021 terhadap target 2024 sebesar 87.03%.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, dilakukan beberapa kegiatan seperti : Monitoring Lokasi Serah Terima Fisik Komoditi, Pengelolaan Data Pengawasan transaksi PBK, Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA dan Monitoring Perkembangan Harga Komoditi Pasar Berjangka.

1. Pengawasan Transaksi PBK

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa transaksi yang tercatat oleh pelaku pasar sesuai dengan data dan informasi yang dimiliki oleh regulator. Selain itu, untuk memantau dan mengawasi indikasi-indikasi pelanggaran transaksi yang dilakukan oleh para pelaku pasar tersebut baik Pialang Berjangka maupun Pedagang Berjangka.

Selama tahun 2021, kegiatan pengawasan transaksi telah dilaksanakan di 19 (Sembilan belas) perusahaan di Dalam dan Luar Kota yang terdiri dari:

1. Kantor Pusat PT Mega Menara Mas Berjangka (Bilateral);
2. Kantor Pusat PT Topgrowth Futures (Bilateral);
3. Kantor Pusat PT ABI Komoditi Berjangka (Multilateral);
4. Kantor Pusat PT Global Intra Berjangka (Multilateral);
5. Kantor Cabang PT Didi Max Berjangka (Bilateral);
6. Kantor Cabang PT Royal Trust Futures (Multilateral);
7. Kantor Cabang PT Interpan Pasifik Futures (Bilateral);
8. Kantor Pusat PT Maxco Futures (Multilateral);
9. Kantor Pusat PT Century Investment Futures (Bilateral);
10. Kantor Pusat PT Trijaya Pratama Futures (Bilateral);
11. Kantor Cabang PT Central Capital Futures (Bilateral);
12. Kantor Pusat PT Didi Max Berjangka (Multilateral);
13. Kantor Pusat PT Finex Berjangka (Multilateral);
14. Kantor Pusat PT Soegee Futures (Bilateral);
15. Kantor Cabang PT Nine Stars Futures (Bilateral);
16. Kantor Pusat PT Mentari Mulia Berjangka (Multilateral);
17. Kantor Cabang PT. Best Profit Futures Bandung
18. Kantor Cabang PT. Rifan Financindo Berjangka Solo
19. Kantor Cabang PT. Solid Gold Berjangka Palembang

Tabel 4.

**Rekapitulasi Pialang Berjangka Peserta SPA yang Dikenakan aturan
Kewajiban Bertransaksi di Bursa Berjangka Tahun 2021**

NO	BULAN	PIALANG SPA					PIALANG NON SPA		TOTAL PIALANG
		MEMENUHI (>3500 & >5%)	TIDAK MEMENUHI (<3500)	TIDAK MEMENUHI (<5%)	TIDAK MEMENUHI (<3500 DAN <5%)	"NOL" TRANSAKSI	AKTIF TRANSAKSI	"NOL" TRANSAKSI	
1	JANUARI	45	4	1	1	3	5	7	66
2	FEBRUARI	43	7	1	1	3	7	4	66
3	MARET	42	4	3	2	4	5	6	66
4	APRIL	42	7	1	2	3	6	4	65
5	MEI	44	5	1	2	3	9	1	65
6	JUNI	44	8	-	2	2	6	4	66
7	JULI	43	9	1	3	1	5	4	66
8	AGUSTUS	46	7	1	2	1	5	4	66
9	SEPTEMBER	45	8	2	1	1	5	4	66
10	OKTOBER	46	8	3	1	0	5	3	66
11	NOVEMBER	48	4	4	2	0	5	3	66
12	DESEMBER	51	3	2	1	1	5	3	66
	RATA-RATA	44	7	1	2	2	6	4	66

Tabel 5.

**Rekapitulasi Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang Dikenakan
aturan Kewajiban Bertransaksi di Bursa Berjangka**

NO	BULAN	PENYELENGGARA SPA					NON SPA	TOTAL PEDAGANG
		MEMENUHI (>3500 & >5%)	TIDAK MEMENUHI (<3500)	TIDAK MEMENUHI (<5%)	TIDAK MEMENUHI (<3500 DAN <5%)	"NOL" TRANSAKSI		
1	JANUARI	14	1	1	0	1	0	17
2	FEBRUARI	14	1	1	0	1	0	17
3	MARET	14	1	1	0	1	0	17
4	APRIL	15	0	0	0	2	0	17
5	MEI	14	0	1	0	2	1	18
6	JUNI	14	0	1	0	2	1	18
7	JULI	15	1	0	0	1	1	18
8	AGUSTUS	14	1	1	0	1	1	18
9	SEPTEMBER	15	0	1	0	1	1	18
10	OKTOBER	14	0	3	0	0	1	18
11	NOVEMBER	17	0	0	0	0	1	18
12	DESEMBER	16	0	1	0	0	1	18
	RATA-RATA	15	0	1	0	1	1	18

2. Monitoring Lokasi Serah Terima Fisik Komoditi

Kegiatan Monitoring Lokasi Serah Terima Fisik Komoditi bertujuan untuk melihat pelaksanaan lokasi serah fisik komoditi yang diperdagangkan di bursa dengan cara melakukan kunjungan ke lokasi serah fisik di gudang / lokasi yang telah ditentukan dalam kontrak berjangka yang diselenggarakan oleh BBJ maupun BKDI serta mengevaluasi hasil tinjauan/pengamatan terhadap pelaksanaan serah terima fisik kontrak komoditi berjangka.

3. Pengelolaan Data Pengawasan transaksi PBK

Kegiatan Pengelolaan Data Pengawasan Transaksi PBK bertujuan untuk melakukan proses updating data secara berkala terkait data pelaporan transaksi yang diterima dari Bursa Berjangka, perubahan data kontrak berjangka, perubahan data pelaku PBK dan proses *cash settlement* yang terjadi di Bursa Berjangka. Untuk tahun 2021 akan dilakukan updating beberapa fitur tambahan antara lain: penyajian laporan harian, penyajian laporan perkembangan per produk untuk kontrak SP dan pelaporan transaksi pasar fisik Timah dan pelaporan pasar Fisik Aset Kripto.

4. Pengembangan Sistem Aplikasi Pengawasan Transaksi SPA

Kegiatan Pengembangan Sistem Aplikasi Sistem Pengawasan Transaksi SPA bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sistem sehingga dapat terkoneksi dengan sistem Penyelenggara SPA lainnya. Untuk tahun 2021, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SPTT-SPA lebih difokuskan kepada :

a. Memperbaiki Kesalahan (*Correcting Errors*)

Pemeliharaan / Maintenance dilakukan untuk mengatasi kegagalan dan permasalahan yang muncul saat sistem dioperasikan. Misalnya untuk mengungkapkan kesalahan pemrograman (bugs) atau kelemahan selama proses pengembangan yang tidak terdeteksi dalam pengujian sistem, sehingga kesalahan tersebut dapat diperbaiki.

b. Menjamin dan Meningkatkan Kinerja Sistem (*Feedback Mechanism*)

Merupakan salah satu aktivitas maintenance yang meliputi tinjauan sistem secara periodik agar sistem berjalan dengan baik, dengan cara memonitor sistem secara terus-menerus terhadap potensi masalah atau perlunya perubahan terhadap sistem.

c. Menjaga Kematangan Sistem (*System Update*)

Merupakan proses modifikasi terhadap sistem yang telah dibangun karena adanya perubahan yang terjadi sesuai dengan kebutuhan.

Kegiatan pengembangan aplikasi SPTT-SPA bertujuan untuk :

1. Minimnya Pelanggaran transaksi yang tidak terdeteksi
2. Pelanggaran terhadap transaksi dapat diketahui secara dini
3. Berkurangnya jumlah data pelanggaran transaksi

5. Monitoring Perkembangan Harga Komoditi Pasar Berjangka

Kegiatan Monitoring Perkembangan Harga Komoditi Pasar Berjangka bertujuan untuk melihat pelaksanaan transaksi kontrak berjangka multilateral dengan mengevaluasi pelaksanaan dan transaksi kontrak berjangka yang diselenggarakan oleh BBJ maupun BKDI, mengevaluasi pelaporan transaksi kontrak berjangka komoditi terkait perkembangan harga dan volume transaksi serta komponen yang terkait dalam pembentukan harga yang mencerminkan karakteristik masing masing komoditi yang bersifat spesifik serta perkembangan harga komoditi dunia.

Sampai dengan Triwulan III (Januari – September) tahun 2021, kegiatan Monitoring Perkembangan Harga Komoditi Pasar Berjangka telah selesai dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali yaitu di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengamati perkembangan harga komoditas kakao

Tabel 6.

Volume Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2021

JENIS KONTRAK	2017		2018		2019		2020		2021	
	VOLUME (LOT)	PERUB (%)	VOLUME (LOT)	PERUB (%)	VOLUME (LOT)	PERUB (%)	VOLUME (LOT)	PERUB (%)	VOLUME (LOT)	PERUB (%)
KONTRAK MULTILATERAL BBJ	1.090.782	23,57 ↑	1.335.815	22,46 ↑	1.467.893	9,89 ↑	1.679.107	14,39 ↑	2.039.083	21,44 ↑
KONTRAK MULTILATERAL BKDI	241.429	-57,21 ↓	185.573	-23,14 ↓	321.495	73,24 ↑	544.041	69,22 ↑	700.730	28,80 ↑
TOTAL KONTRAK MULTILATERAL (BBJ + BKDI)	1.332.211	-7,93 ↓	1.521.388	14,20 ↑	1.789.388	17,62 ↑	2.223.148	24,24 ↑	2.739.813	23,24 ↑
KONTRAK SPA BBJ	4.092.411	-1,29 ↓	5.398.260	31,91 ↑	6.476.133	19,97 ↑	7.759.275	19,81 ↑	7.527.098	-2,99 ↓
KONTRAK SPA BKDI	1.621.557	14,25 ↑	1.902.114	17,30 ↑	2.857.117	50,21 ↑	3.233.245	13,16 ↑	4.313.240	33,40 ↑
TOTAL KONTRAK SPA (BBJ + BKDI)	5.713.968	2,67 ↑	7.300.374	27,76 ↑	9.333.250	27,85 ↑	10.992.520	17,78 ↑	11.840.338	7,71 ↑
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BBJ	5.183.193	3,07 ↑	6.734.075	29,92 ↑	7.944.026	17,97 ↑	9.438.381	18,81 ↑	9.566.181	1,35 ↑
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BKDI	1.862.986	-6,08 ↓	2.087.687	12,06 ↑	3.178.612	52,26 ↑	3.777.286	18,83 ↑	5.013.970	32,74 ↑
TOTAL VOLUME TRANSAKSI PBK	7.046.179	0,48 ↑	8.821.762	25,20 ↑	11.122.638	26,08 ↑	13.215.668	18,82 ↑	14.580.151	10,32 ↑

Sumber: BBJ dan BKDI (diolah Bappebti) s.d. Desember 2021

Berdasarkan data transaksi yang dilaporkan oleh Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) dan Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI), jumlah volume transaksi kontrak berjangka tahun 2021 adalah sebesar 14.580.151 Lot. Jumlah volume transaksi tersebut mengalami peningkatan sebesar 10,32% dibandingkan dengan tahun 2020 yang jumlahnya sebesar 13.215.668 Lot. Khusus untuk jumlah Transaksi Multilateral, pada tahun 2021 mencapai sebesar 2.739.813 Lot, dimana jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 23,24% dibandingkan dengan tahun 2020 yang jumlahnya sebesar 2.223.148 Lot.

Tabel 7.
Share Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi 2021

JENIS KONTRAK	2017		2018		2019		2020		2021	
	VOLUME (LOT)	SHARE (%)	VOLUME (LOT)	SHARE (%)	VOLUME (LOT)	SHARE (%)	VOLUME (LOT)	SHARE (%)	VOLUME (LOT)	SHARE (%)
KONTRAK MULTILATERAL BBJ	1.090.782	15,48%	1.335.815	15,14%	1.467.893	13,20%	1.679.107	12,71%	2.039.083	13,99%
KONTRAK MULTILATERAL BKDI	241.429	3,43%	185.573	2,10%	321.495	2,89%	544.041	4,12%	700.730	4,81%
TOTAL KONTRAK MULTILATERAL (BBJ + BKDI)	1.332.211	18,91%	1.521.388	17,25%	1.789.388	16,09%	2.223.148	16,82%	2.739.813	18,79%
KONTRAK SPA BBJ	4.092.411	58,08%	5.398.260	61,19%	6.476.133	58,22%	7.759.275	58,71%	7.527.098	51,63%
KONTRAK SPA BKDI	1.621.557	23,01%	1.902.114	21,56%	2.857.117	25,69%	3.233.245	24,47%	4.313.240	29,58%
TOTAL KONTRAK SPA (BBJ + BKDI)	5.713.968	81,09%	7.300.374	82,75%	9.333.250	83,91%	10.992.520	83,18%	11.840.338	81,21%
TOTAL SHARE MULTILATERAL DAN SPA		100%		100%		100%		100%		100%
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BBJ	5.183.193	73,56%	6.734.075	76,33%	7.944.026	71,42%	9.438.381	71,42%	9.566.181	65,61%
TOTAL VOLUME TRANSAKSI BKDI	1.862.986	26,44%	2.087.687	23,67%	3.178.612	28,58%	3.777.286	28,58%	5.013.970	34,39%
TOTAL VOLUME TRANSAKSI PBK	7.046.179	100%	8.821.762	100%	11.122.638	100%	13.215.668	100%	14.580.151	100%

Sumber: BBJ dan BKDI (diolah Bappebti) s.d. Desember 2021

Apabila dilihat dari besarnya *Market share* transaksi multilateral terhadap total transaksi Perdagangan Berjangka, pada tahun 2021 *Market Share* untuk Volume Transaksi Multilateral adalah sebesar 18,79%, naik dibandingkan dengan *Market Share* tahun 2020 yang sebesar 16,82%.

Untuk Nilai Transaksi Kontrak Berjangka pada tahun 2021 sebesar Rp 199.268.236.121.960, angka tersebut mengalami penurunan sebesar 2,14% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp203.630.888.929.537.

Untuk produk multilateral yang mengalami peningkatan di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu metal (dengan kenaikan 13,27 % di BBJ dan 98,44 % di BKDI) dan energi dengan kenaikan 251,2 %.

Dalam pencapaian indikator Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi terdapat beberapa kendala seperti :

- Masih terdapat pelaku usaha yang terlambat dalam menyampaikan laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan transaksi
- Masih terdapat pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban pemenuhan transaksi kontrak berjangka multilateral di bursa berjangka

Tindak lanjut yang dilakukan pada periode mendatang untuk memaksimalkan pengawasan transaksi pelaku usaha yaitu :

- Mengingatkan pelaku usaha yang masih terlambat dalam penyampaian laporan transaksi baik bulanan maupun triwulanan agar tepat waktu dalam menyampaikan laporannya.
- Mengingatkan pelaku usaha yang belum memenuhi kewajiban pemenuhan transaksi kontrak berjangka multilateral di bursa berjangka untuk segera memenuhi kewajiban dimaksud
- Berkoordinasi dengan biro terkait dalam rangka penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan

b. IK - 2, Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT

Indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT berdasarkan pada capaian **kepatuhan pialang berjangka, terdiri dari penilaian kepatuhan atas kewajiban pelaporan serta integritas keuangan Pialang Berjangka dan Penyelenggara SPA, meliputi :**

Tabel 8.
Aspek Penilaian Kepatuhan Pialang Berjangka

No	Aspek Penilaian
A.	Pemenuhan Nilai Modal Disetor
B.	Pemenuhan Nilai Ekuitas
C.	Pemenuhan Modal Bersih Disesuaikan
D.	Pemenuhan Penempatan Margin di LKB
E.	Ketepatan Penyampaian Laporan Kegiatan Bulanan DK dan APU PPT
F.	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Harian
G.	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan

Tata cara penghitungan nilai kepatuhan pelaku usaha dalam kegiatan operasional, keuangan, dan APU PPT, sebagai berikut:

1. Penilaian Kepatuhan Pialang Berjangka:

$$X = \frac{A+B+C+D+E+F+G}{7}$$

***) Keterangan :**

X = Jumlah Pialang Berjangka yang patuh dalam kegiatan operasional, keuangan dan APU PPT rata-rata per bulan

A = Jumlah Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban persyaratan nilai modal disetor

B = Jumlah Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban nilai ekuitas

C = Jumlah Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban nilai Modal Bersih Disesuaikan

D = Jumlah Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban Penempatan Margin di Lembaga Kliring Berjangka

E = Jumlah Pialang Berjangka yang telah menyampaikan Laporan Bulanan Direktur Kepatuhan secara tepat waktu

F = Jumlah Pialang Berjangka yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Harian, secara tepat waktu-

G = Jumlah Pialang Berjangka yang telah menyampaikan Laporan Keuangan, Bulanan, secara tepat waktu

2. Penilaian Kepatuhan Pedagang Penyelenggara SPA

Tabel 9.

Aspek Penilaian Kepatuhan Pedagang Penyelenggara SPA

No	Aspek Penilaian
H.	Pemenuhan Nilai Modal Disetor
I.	Pemenuhan Nilai Ekuitas
J.	Pemenuhan Penempatan Margin di LKB
K.	Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Bulanan

$$Y = \frac{H+I+J+K}{4}$$

Keterangan :

Y = Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang patuh dalam kegiatan operasional dan keuangan rata-rata per bulan.

H = Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang memenuhi kewajiban persyaratan nilai modal disetor

I = Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang memenuhi kewajiban nilai ekuitas

J = Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang memenuhi kewajiban Penempatan Margin di Lembaga Kliring Berjangka

K = Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan, secara tepat waktu.

Dari penilaian kepatuhan kedua pelaku usaha tersebut (Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara SPA), diperoleh formula perhitungan sebagai berikut:

Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT (Z):

$$Z = X + Y$$

Z = Rata – Rata Nilai Kepatuhan Pialang Berjangka (X) + Rata – Rata Nilai Kepatuhan Pedagang Penyelenggara SPA (Y)

Sehingga nilai capaian jumlah pelaku usaha yang patuh dalam kegiatan operasional, keuangan, dan APU PPT selama Tahun 2021 sebesar 76 perusahaan, sebagaimana tergambar sebagai berikut:

Tabel 10.
Nilai Capaian Jumlah Pelaku Usaha Yang Patuh Dalam Kegiatan
Operasional, Keuangan, dan APU PPT selama Tahun 2021

Komponen Indikator Kepatuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata
Jumlah Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban persyaratan nilai modal disetor (A)	66	66	66	65	65	65	66	66	66	66	66	66	66
Jumlah Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban nilai ekuitas (B)	64	64	63	62	64	64	65	64	65	65	65	64	64
Jumlah Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban nilai Modal Bersih Disesuaikan (C)	61	63	64	62	62	61	63	64	65	65	65	65	63
Jumlah Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban Penempatan Margin di Lembaga Kliring Berjangka (D)	60	61	61	59	63	64	65	64	63	66	64	66	63
Jumlah Pialang Berjangka yang telah menyampaikan Laporan Bulanan Direktur Kepatuhan secara tepat waktu (E)	64	65	65	64	64	64	64	66	66	65	65	65	65
Jumlah Pialang Berjangka yang telah menyampaikan Laporan Keuangan (Harian, secara tepat waktu (F).	59	59	57	57	59	63	61	60	60	63	62	61	60

Komponen Indikator Kepatuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata
Jumlah Pialang Berjangka yang telah menyampaikan Laporan Keuangan, Bulanan secara tepat waktu (G)	65	63	63	63	64	62	65	65	65	66	66	66	64
X	63	63	63	62	63	63	64	64	64	65	65	65	64
Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang memenuhi kewajiban persyaratan nilai modal disetor (H)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	18	17
Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang memenuhi kewajiban nilai ekuitas (I)	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	18	17
Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang memenuhi kewajiban Penempatan Margin di Lembaga Kliring Berjangka (J)	16	16	16	16	16	17	16	15	15	15	16	18	16
Jumlah Pedagang Berjangka Penyelenggara SPA yang telah menyampaikan Laporan Keuangan (Bulanan secara tepat waktu (K)	17	16	17	17	17	17	17	17	17	16	17	18	17
Y	17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	17	18	17

Komponen Indikator Kepatuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Rata
Nilai Z Rata-rata X+ Rata- rata Y)	81												

**Tabel 11
Capaian IKK-2 Tahun 2021**

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT	57	81	142,11%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat capaian jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT pada tahun 2021 tercapai sebanyak 81 perusahaan. Bila dibandingkan dengan target 2021, capaian mencapai 142,11 %. Tercapainya target Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT dikarenakan adanya koordinasi yang baik antar unit eselon II Bappebti dalam melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaku usaha PBK sehingga pelaku usaha memahami aturan dan dasar hukum dalam kegiatan operasional perusahaan.

Pada tahun 2020, Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT tercapai sebanyak 76 (tujuh puluh enam) perusahaan. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021, pada tahun 2021 terjadi peningkatan.

Apabila capaian Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT dibandingkan dengan target akhir Rencana strategis (tahun 2024) yaitu sebesar 63 perusahaan maka Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT tahun 2021 terhadap target 2024 sebesar 128.57%.

Indikator Kinerja ini didukung oleh 4 (empat) kegiatan pendukung lainnya yaitu: Pengawasan Kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK, Pertemuan Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK, Pengembangan Aplikasi

Sistem Pelaporan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka, dan Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK.

1. Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK

Kegiatan ini terdiri dari Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaporan Bulanan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka dan Pengawasan Kepatuhan atas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) pada Pialang Berjangka bertujuan untuk menghimpun berbagai informasi tentang kegiatan para pelaku usaha PBK, sehingga didapatkan gambaran mengenai perkembangan kegiatan setiap pelaku usaha selama periode tertentu.

Selama tahun 2021, rata-rata jumlah perusahaan pialang berjangka yang menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan secara tepat waktu setiap bulannya sebanyak 65 (enam puluh lima) perusahaan. Target untuk jumlah perusahaan pialang berjangka yang menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan secara tepat waktu adalah pelaku usaha PBK yang aktif yang saat ini berjumlah 66 (enam puluh enam) perusahaan, yang artinya masih terdapat perusahaan yang belum atau tidak menyampaikan laporan Direktur Kepatuhan.

Untuk itu, perlu adanya pembinaan yang lebih baik lagi terhadap para Direktur Kepatuhan (DK) Pialang Berjangka dengan membangun komunikasi melalui kunjungan kerja yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti secara berkesinambungan.

Capaian jumlah pelaku usaha PBK yang menyampaikan Laporan Direktur Kepatuhan secara tepat waktu dihitung dari akumulasi rata-rata perbulan dari laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha secara tepat waktu dibagi 12 (dua belas) bulan.

Dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK sampai dengan Desember Tahun 2021 telah dilakukan Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaporan Bulanan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka dan Pengawasan Kepatuhan atas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) pada Pialang Berjangka dengan rincian sebagai berikut:

- Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaporan Bulanan Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka sebanyak 7 (tujuh) perusahaan:
 1. PT Topgrowth Futures

2. PT Premier Equity Futures
 3. PT Inter Pan Pasific Futures
 4. PT Finex Berjangka
 5. PT ABI Komoditi Berjangka
 6. PT Kontakperkasa Futures di Bali;
 7. PT Valbury Asia Futures
- Pengawasan Kepatuhan atas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU-PPT) sebanyak 6 (enam) perusahaan:
 1. PT Prudent Internasional Berjangka
 2. PT Universal Futures
 3. PT Rifan Financindo Berjangka
 4. PT ABI Komoditi Berjangka
 5. PT Java Global Futures
 6. PT IDS Kapital Berjangka

Jumlah pengawasan Onsite tersebut lebih sedikit dari jumlah pengawasan onsite pada tahun 2020 karena terdapat refocusing anggaran.

2. Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK

Dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap integritas keuangan Pelaku Usaha dan kepatuhan penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka, peran yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik di dalam melakukan analisis laporan keuangan pelaku usaha menjadi sangat penting untuk mewujudkan kepatuhan Pialang Berjangka terhadap peraturan perundang-undangan yang dilihat dari aspek integritas keuangan para Pelaku Usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf k. UU No 10 Tahun 2011 yaitu menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Maksud dan tujuan pelaksanaan analisis terhadap laporan keuangan Pialang Berjangka dalam Perdagangan Berjangka Komoditi adalah:

1. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan terlindunginya masyarakat dari tindakan yang

merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak dalam suasana persaingan yang sehat;

2. Melakukan pembinaan terhadap Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara SPA;
3. Mengetahui tingkat kepatuhan Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara SPA terhadap peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi khususnya yang terkait dengan pelaporan keuangan dan persyaratan keuangan minimum (integritas keuangan) dan kewajiban pelaporan keuangan Pialang Berjangka dan Pedagang Penyelenggara SPA.

Untuk memenuhi capaian Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh terhadap integritas keuangan, penilaiannya dilihat dari beberapa aspek yakni penyampaian laporan keuangan, pemenuhan modal disetor, ekuitas, modal bersih disesuaikan serta penempatan margin 70% pada Lembaga Kliring Berjangka. Pengawasan dilakukan baik secara *on-site* maupun *off-site*. Adapun pengawasan secara *offsite* menggunakan sistem pelaporan e-reporting. Berikut rata-rata hasil analisis pelaku usaha yang patuh terhadap integritas keuangan pada Tahun 2021:

1. Rata-rata Pialang Berjangka yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Harian secara tepat waktu sebanyak 60 (enam puluh) perusahaan dan yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan secara tepat waktu sebanyak 64 (enam puluh empat) perusahaan, sedangkan untuk Penyelenggara SPA, rata-rata perusahaan yang telah menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan secara tepat waktu sebanyak 17 (tujuh belas);
2. Rata-rata Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban persyaratan nilai modal disetor yakni sebanyak 66 (enam puluh enam) perusahaan sedangkan Penyelenggara SPA sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan;
3. Rata-rata Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban nilai ekuitas sebanyak 64 (enam puluh empat) perusahaan sedangkan Penyelenggara SPA sebanyak 17 (tujuh belas) perusahaan;
4. Rata-rata Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban nilai Modal Bersih Disesuaikan (MBD) sebanyak 63 (enam puluh tiga) perusahaan

sedangkan untuk Penyelenggara SPA tidak memiliki indikator dalam kewajiban memenuhi integritas keuangan tersebut;

5. Rata-rata Pialang Berjangka yang memenuhi kewajiban Penempatan Margin di Lembaga Kliring Berjangka sebanyak 63 (lima puluh tiga) perusahaan sedangkan Penyelenggara SPA sebanyak 16 (enam belas) perusahaan.

Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan Pelaku Usaha PBK yang dilakukan melalui kunjungan ke Lapangan (*onsite*) sampai dengan Tahun 2021 telah dilakukan Pengawasan terhadap 12 (dua belas) Perusahaan Pialang Berjangka dan Penyelenggara SPA, yaitu:

1. PT PG Berjangka di Jakarta (Pialang Berjangka);
2. PT ABI Komoditi Berjangka di Jakarta (Pialang Berjangka);
3. PT Prudent International Berjangka di Jakarta (Pialang Berjangka);
4. PT Jasa Mulia Forexindo di Jakarta (Penyelenggara SPA);
5. PT Menara Mas Investindo di Jakarta (Penyelenggara SPA);
6. PT Pacific Duaribu Futures di Jakarta (Pialang Berjangka);
7. PT Teknologi Finansial Berjangka di Jakarta (Pialang Berjangka);
8. PT Inter Pan Pasifik Futures di Jakarta (Pialang Berjangka);
9. PT Indosukses Futures di Jakarta (Pialang Berjangka);
10. PT International Business Futures di Bandung (Pialang Berjangka);
11. PT Harta International Investama di Jakarta (Penyelenggara SPA);
12. PT Java Global Futures di Tangerang (Pialang Berjangka).

3. Pengawasan Kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK

Menindaklanjuti laporan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No. 42/BAPPEBTI/KP/1/2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Bappebti No. 35/Bappebti/KP/III/2002 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Mengenai Keadaan dan Perkembangan Kegiatan Usaha Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Pengelola Sentra Berjangka, Pedagang Berjangka dan Bank Penyimpan Marjin, Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik – Bappebti melakukan pengolahan dan analisis data serta informasi yang selanjutnya menjadi hasil laporan Pemantauan dan Evaluasi Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK yang

memuat informasi keadaan dan perkembangan kegiatan pelaku usaha PBK selama 1 (satu) tahun. Sampai dengan Desember 2021, kegiatan pengawasan onsite ini tidak dapat dilaksanakan karena terdapat refocusing anggaran

4. Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK

Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK membahas hal-hal terkait Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK dengan Lembaga atau Kementerian terkait. Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK terdiri dari rapat dan Perjalanan dinas dalam untuk Pimpinan maupun Pegawai di lingkungan Biro guna melakukan koordinasi dan konsolidasi Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK dengan Lembaga atau Kementerian terkait seperti menghadiri rapat atau pelatihan. Sampai dengan Desember Tahun 2021, pelaksanaan Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK Tahun 2021 dilakukan sebanyak:

- a. 1 (satu) kali Forum Komunikasi Teknis (FKT) pada tanggal 1 Desember 2021. Kegiatan ini berupa pertemuan antara Bappebti selaku regulator dengan para pelaku usaha dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha PBK selama periode tertentu. Dalam kondisi pandemic Covid19, kegiatan FKT tersebut dilaksanakan secara daring dengan mengundang Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka, dihadiri pula oleh Direksi Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, serta pengurus Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia (Aspeptindo) dan PPATK.
- b. 2 (dua) kali perjalanan dinas di luar kota

Dalam pencapaian indikator Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT terdapat beberapa kendala seperti :

- Masih terdapat pelaku usaha yang terlambat menyampaikan laporan keuangannya.
- Masih terdapat pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan minimum integritas keuangannya, seperti Modal Bersih Disesuaikan, Ekuitas, pemenuhan margin di LKB,

Tindak lanjut yang dilakukan pada periode mendatang untuk memaksimalkan pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam kegiatan operasional, keuangan, dan APU PPT yaitu:

- Menghubungi/mengingatkan pelaku usaha yang pada saat hari terakhir penyampaian laporan belum menyampaikan laporannya.
- Berkoordinasi dengan Biro terkait dalam rangka peneraan sanksi dan proses perizinan terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan di atas.

c. IK - 3, Persentase pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit

Audit Pelaku Usaha merupakan Audit atau pemeriksaan berdasarkan pendekatan kepatuhan terhadap Peraturan yang berlaku dan berdasarkan Pendekatan Analisis Risiko (*Risk Based Approach*). Audit berdasarkan Kepatuhan adalah proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan audit dengan Pendekatan Analisis Risiko (*Risk Based Approach*) digunakan untuk menentukan area penting yang seharusnya menjadi fokus prioritas dalam pelaksanaan audit. Dalam audit kinerja, risiko lebih ditekankan kepada risiko yang ditanggung oleh perusahaan/manajemen terkait dengan aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Tabel. 12
Capaian IKK-3 Tahun 2021

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	73%	100%	136,99%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Persentase pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit pada tahun 2021 tercapai sebesar 136,99% dari target tahun 2021. Tercapainya indikator tersebut karena pelaku usaha menindaklanjuti hasil audit untuk perbaikan baik dalam hal administrasi laporan keuangan maupun operasional perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bila dibandingkan dengan tahun 2020 dimana target dari IKK ini sebesar 70% dan realisasinya sebesar 100% atau tercapai sebesar 142,86%, maka capaian

pada tahun 2021 sebesar 136,99% terlihat mengalami penurunan. Hal ini lebih dikarenakan penetapan target di tahun 2021 sebesar 73% lebih besar dibandingkan dengan target tahun 2021 yang hanya 70%. Namun demikian hal ini tidak menjadi masalah, sebab seluruh perusahaan yang diaudit oleh Bappebti telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit yang diberikan.

Dengan memperhatikan kinerja selama tahun 2020 dan 2021, dimana seluruh pelaku usaha (perusahaan) yang diaudit telah menindaklanjuti/melakukan rekomendasi yang diberikan oleh Bappebti, maka kami optimis target IKK ini akan tercapai juga di tahun 2022, 2023 dan 2024, dimana target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 75%, 77% dan 80%. Keberhasilan pencapaian ini dikarenakan keinginan dari pelaku usaha untuk memperbaiki temuan audit sehingga hal ini secara tidak langsung akan menghindarkan mereka dari pengenaan sanksi yang dikarenakan tidak melakukan rekomendasi atas hasil audit yang diberikan Bappebti.

Adapun Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah pelaku usaha PBK yang diaudit didukung oleh 2 (dua) kegiatan yaitu Audit Pelaku Usaha PBK dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit. Sedangkan 2 (dua) kegiatan lainnya yaitu Sertifikasi Auditor Bappebti Pengembangan Sistem Manajemen Audit (SIMA) tidak jadi dilakukan karena mengalami optimalisasi anggaran dalam rangka refocusing untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

1. Audit Pelaku Usaha PBK

Dalam rangka mengetahui tingkat kepatuhan operasional pelaku usaha dalam memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku maka perlu dilakukan Audit terhadap kegiatan pelaku usaha guna meningkatkan kepatuhan dan integritas pelaku usaha serta perlindungan terhadap nasabah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Sesuai dengan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 huruf e UU No 10 Tahun 2011, Bappebti dapat melakukan pemeriksaan terhadap Pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran.

Dari pelaksanaan pemeriksaan/audit mempunyai beberapa maksud dan tujuan yaitu:

- a. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat;
- b. Melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka;
- c. Mengetahui keadaan dan perkembangan terakhir kegiatan usaha Pialang Berjangka;
- d. Memberikan keyakinan yang memadai bahwa ketentuan yang berlaku di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi telah dilaksanakan oleh pelaku usaha.

Pada Tahun 2021, Bappebti hanya melakukan audit ke 12 (dua belas) perusahaan, dikarenakan adanya optimalisasi anggaran dalam rangka penanganan covid-19 di Indonesia. Berikut pelaku usaha yang telah di Audit pada tahun 2021, yaitu:

1. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT Bestprofit Futures di Jakarta;
2. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT Central Capital Futures di Jakarta;
3. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT Esandar Arthamas Berjangka di Jakarta;
4. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT Equityworld Futures di Jakarta;
5. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT United Asia Futures di Jakarta;
6. Audit Rutin Kantor Cabang Pialang Berjangka PT Kontakperkasa Futures di Yogyakarta;
7. Audit Rutin Kantor Cabang Pialang Berjangka PT Rifan Financindo Berjangka di Semarang;
8. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT IDS Kapital Berjangka di Jakarta;
9. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT TRFX Garuda Berjangka di Jakarta;
10. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT MRG Mega Berjangka di Jakarta;
11. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT Trijaya Pratama Futures di Jakarta; dan

12. Audit Rutin Kantor Pusat Pialang Berjangka PT Soegee Futures di Jakarta.

2. **Monitoring Tindaklanjut Hasil Audit**

Monitoring tindak lanjut hasil audit merupakan rangkaian kegiatan audit setelah Bappebti memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha. Pelaksanaan kegiatan ini sangat menentukan dalam mengevaluasi pelaksanaan rekomendasi yang dilakukan oleh pelaku usaha, sehingga diketahui apakah pelaku usaha telah melakukan rekomendasi (langkah perbaikan) yang diminta oleh Bappebti dan dapat menghindarkan mereka dari sanksi akibat kelalaian yang mereka lakukan.

Dari 12 (dua belas) perusahaan yang telah dilakukan Audit pada tahun 2021, seluruhnya telah dilakukan monitoring atas tindak lanjut hasil audit, dimana sebanyak 10 (sepuluh) perusahaan dilakukan monitoring secara langsung (*onsite*) dan 2 (dua) perusahaan tidak dilakukan monitoring tindak lanjut hasil audit secara langsung (*onsite*) dikarenakan anggarannya dioptimalisasikan dalam penanganan covid-19 di Indonesia. Pelaksanaan monitoring terhadap 2 (dua) perusahaan dilakukan dengan cara penyampaian bukti telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan melalui surat (*hardcopy*) dengan ditembuskan melalui surat elektronik (*email*).

Tabel. 13
Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Tindaklanjut Hasil Audit Tahun 2021

No	Perusahaan	Lokasi
1.	PT Bestprofit Futures	Jakarta
2.	PT Central Capital Futures	Jakarta
3.	PT Esandar Arthamas Berjangka	Jakarta
4.	PT Equityworld Futures	Jakarta
5.	PT United Asia Futures	Jakarta
6.	PT Kontakperkasa Futures*	Yogyakarta
7.	PT Rifan Financindo Berjangka*	Semarang
8.	PT IDS Kapital Berjangka	Jakarta
9.	PT TRFX Garuda Berjangka	Jakarta
10.	PT MRG Mega Berjangka	Jakarta

11.	PT Trijaya Pratama Futures	Jakarta
12.	PT Soegee Futures	Jakarta

Keterangan: *) dilakukan secara tidak langsung (*online*)

Dalam pencapaian indikator Persentase pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit terdapat beberapa kendala seperti:

1. Pelaku usaha (perusahaan) masih sering meminta waktu tambahan untuk menyelesaikan rekomendasi hasil audit, khususnya untuk temuan terkait penutupan akun dan pengembalian sisa dana Nasabah yang sudah tidak aktif bertransaksi paling sedikit 1 (satu) tahun;
2. Masih terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang PBK yang masih dibutuhkan petunjuk teknis dari Bappebti, sehingga hal ini memperlambat proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi oleh pelaku usaha;
3. Masih ditemui adanya beberapa pelaku usaha yang kurang aktif dalam proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit.

Tindak lanjut yang dilakukan pada periode mendatang untuk memaksimalkan pencapaian indikator Persentase pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit yaitu:

1. Mengusulkan kepada Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan untuk Menyusun Peraturan Bappebti terkait hal-hal yang masih kurang jelas pelaksanaan/implementasinya oleh pelaku usaha, sehingga tidak ditemui lagi adanya perbedaan persepsi mengenai implementasi atas ketentuan tersebut;
2. Tim Audit dan Monitoring Audit Bappebti harus lebih aktif dalam mengawal proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh pelaku usaha PBK, sehingga proses kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dapat segera teratasi.

B. Capaian Kinerja Anggaran

Jumlah Anggaran Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik yang digunakan untuk pencapaian indikator kinerja kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.362.968.000,-.

Pada tahun 2021 telah direalisasikan sebesar Rp 1.360.632.893,- yaitu sebesar 99,82 % dari pagu anggaran.

Tabel 14.
Anggaran Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
Tahun 2017 - 2021

No	Tahun	Alokasi Anggaran	PAGU Revisi
1.	2017	Rp5.426.748.000,-	Rp4.820.752.000,-
2.	2018	Rp4.750.000.000,-	Rp4.750.000.000,-
3.	2019	Rp4.700.000.000,-	Rp4.700.000.000,-
4.	2020	Rp5.200.000.000,-	Rp2.683.600.000,-
5.	2021	Rp3.042.960.000,-	Rp1.360.632.893,-

Sumber Data: Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 2021

Rincian realisasi anggaran Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik pada tahun 2021 berdasarkan sasaran dan masing-masing Indikator Kinerja sasaran dapat dilihat di tabel berikut:

Tabel 15.
Realisasi Anggaran Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik
Tahun 2021

No.	Indikator Kinerja	Realisasi S/D 31 Desember 2021 (dalam Rupiah)				
		PAGU (Rp)	Realisasi	%	Sisa	%
1	Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam pelaksanaan transaksi	369.931.000	368.576.793	99,63	Rp1.354.207	0,37
2	Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan dan APU PPT	805.277.000	805.051.700	99,97	Rp225.300	0,03
3	Persentase pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	187.760.000	187.004.400	96,59	Rp755.600	3,41
TOTAL		1.362.968.000	1.360.632.893	99,82	Rp2.335.107	0,18

Sumber Data : Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, 2021

BAB IV

PENUTUP

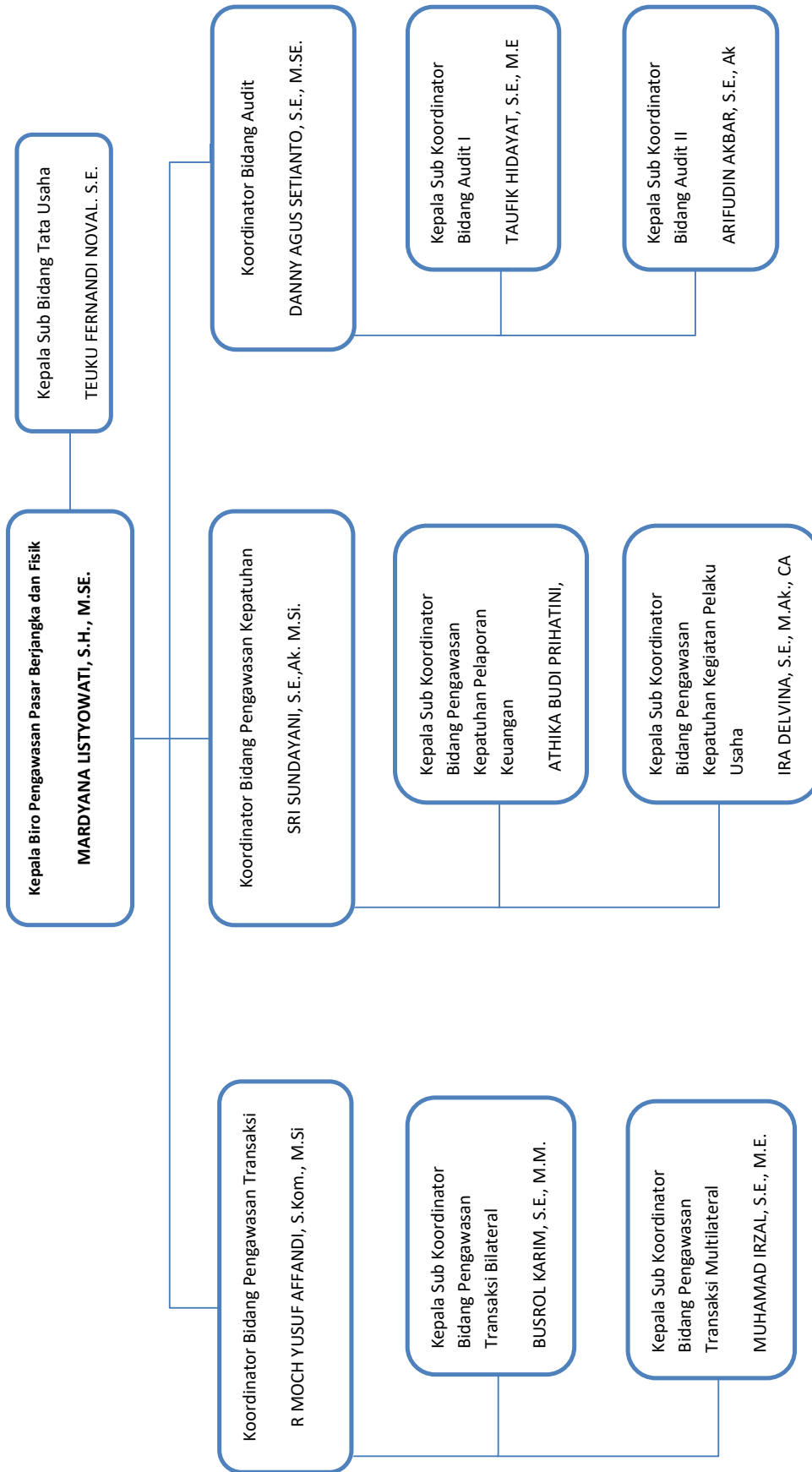
Dalam rangka program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi tahun 2021 Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik mempunyai sasaran yaitu “Meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi” yang merupakan salah satu bentuk pedoman kerja dan menjadi prinsip dasar pelayanan prima yang harus diberikan oleh Bappebti Kementerian Perdagangan sebagai instansi pemerintah terhadap masyarakat, khususnya bagi perlindungan nasabah dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik memiliki 3 indikator kinerja pada tahun 2021, yaitu Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam pelaksanaan transaksi (IK-1) dengan target 47 (empat puluh tujuh) Perusahaan dan tercapai 100%, Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan dan APU PPT (IK-2) dengan target sebesar 57 (lima puluh tujuh) Perusahaan dengan pencapaian 142,11%, Target pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit (IK-3) dengan target 73% dan tercapai 137% dari target.

Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik Bappebti selaku instansi pemerintah yang sebagian besar aktifitasnya lebih berorientasi pada kegiatan yang bersifat pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, menyadari benar bahwa banyak tantangan yang dihadapi, untuk itu pengawasan yang dilakukan harus terus ditingkatkan baik dari segi kuantitas dan kualitasnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun, semoga dapat menjadi alat untuk menginventarisasi keberhasilan dan permasalahan-permasalahan yang ada dan dapat dipergunakan dengan baik untuk evaluasi dan perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

**LAMPIRAN I
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENGAWASAN PASAR BERJANGKA DAN FISIK**



LAMPIRAN II
DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
 Unit Kerja : **Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik**
 Tahun Anggaran : **2021**



BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
 Gedung Bappebti Lantai 3 - 5
 Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta 10430
 Telephone : (021) 31924744 Faxsimile : (021) 31923204
 Website : <http://www.bappebti.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
 NOMOR : **BAPPEBTI.3/PK/01/2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardiyana Listyowati
 Jabatan : Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Sidharta Utama
 Jabatan : Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Selaku *atasannya langsung* pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua
 Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
 Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 11 Januari 2021

Pihak Pertama

Mardiyana Listyowati

Pihak Kedua

Sidharta Utama

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO PENGAWAS PASAR BERJANGKA DAN FISIK
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

PROGRAM:
Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PREDIKSI CAPAIAN (%)				Penanggung Jawab
				TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya hasil pelaksanaan Pelelu Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam pelaksanaan Pelelu Usaha di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	47 Perusahaan	85	91	95	100	Bidang Pengawasan Transaksi
		Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan dan APU PPT	57 Perusahaan	85	90	95	100	Bidang Pengawasan Keptahuan
		Persentase pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	73%	85	90	95	100	Bidang Audit

NO	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PREDIKSI CAPAIAN (%)				Penanggung Jawab
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pelaku Usaha yang patuh dalam pelaksanaan Transaksi	711.930.000	10	30	65	100	Bidang Pengawasan Transaksi
2	Pelaku Usaha yang patuh dalam kegiatan operasional, Keuangan dan APU PPT	1.163.277.000	15	50	75	100	Bidang Pengawasan Keptahuan
3	Pelaku Usaha PBK yang daudit	581.951.000	10	35	65	100	Bidang Audit
JUMLAH		2.457.158.000	12	38	68	100	

Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Sidharta Utama

Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

Mardiyana Listyowati

No	Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Revisi Ke 1	Pagu Revisi Ke 2	Pagu Revisi Ke 3
1	Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi	881.659.000	711.931.000	711.931.000	369.931.000
2	Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT	1.440.609.000	1.163.277.000	1.163.277.000	805.277.000
3	Persentase pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	720.692.000	581.950.000	563.850.000	187.760.000
	Total	3.042.960.000	2,457,158,000	2.439.058.000	1.362.968.000

LAMPIRAN III
FORMULIR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) TAHUN 2021
 Unit Kerja Eselon II : Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (2)	Target (3)	Capaian (5)	Persentase Capaian (6)
Meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi	47 perusahaan	47 perusahaan	100%
	Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT	57 perusahaan	81 perusahaan	142,11%
	Persentase pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	73%	100%	136,99%

Kegiatan (7)	2021		
	Pagu Anggaran (12)	Realisasi (13)	Persentase (14)
Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi	369.931.000	368.576.793	99,63%
Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT	805.277.000	805.051.700	99,97%
Persentase pelaku usaha PBK yang telah melaksanakan rekomendasi hasil audit	187.760.000	187.004.400	96,59%

Jakarta, Februari 2022

Kepala Biro Pengawasan

Pasar Berjangka dan Fisik,



Mardiyana Listyowati

Sasaran Kegiatan (1)	Indikator Kinerja Kegiatan (2)	Target (3)	Realisasi (5)	% Capaian (6)
Meningkatnya hasil pengawasan terhadap pelaku usaha di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	Jumlah pelaku usaha PBK yang patuh dalam Pelaksanaan Transaksi	100% (47 perusahaan)	47 perusahaan	100%
	Jumlah pelaku usaha PBK yang Patuh Dalam Kegiatan Operasional, Keuangan, dan APU PPT	100% (57 perusahaan)	81 perusahaan	142,11%
	Persentase pelaku usaha PBK yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100% (73%)	100%	136,99%

Indikator Kinerja Program (7)	Target (8)	Realisasi (9)	Program/Kegiatan (10)	Pagu Anggaran (11)	Realisasi (12)
Pengawasan transaksi pelaku usaha PBK	100%	99,63%	Pengelolaan Data dan Informasi Pendukung Pengawasan Transaksi PBK	176.192.000	175.257.793
			Pengawasan Transaksi PBK	189.542.000	189.447.000
			Monitoring Lokasi Serah Terima Fisik Komoditi sebagai sarana penyelesaian transaksi PBK	4.197.000	3.872.000
Pengawasan transaksi pelaku usaha PBK	100%	99,97%	Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku Usaha PBK	112.448.000	112.354.300
			Pengawasan Kepatuhan Pelaporan dan Verifikasi Laporan Keuangan	628.827.000	628.761.000
			Pengawasan Kepatuhan Laporan Tahunan Pelaku Usaha PBK	14.570.000	14.570.000
			Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kepatuhan Kegiatan Pelaku	49.432.000	49.366.400
Audit pelaku usaha PBK dan Sertifikasi Auditor	100%	99,63%	Audit Pelaku Usaha PBK	153.520.000	152.780.400
			Monitoring Tindaklanjuti Hasil Audit	34.240.000	34.224.000

Jakarta, Februari 2022
Kepala Biro Pengawasan
Pasar Berjangka dan Fisik,



Mardiyana Listiyowati